



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2021

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
JL. SUROHADIKUSUMO NO. 1 PEMALANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmatNya, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Perubahan dokumen rencana kerja dapat dilakukan apabila adanya hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan baik dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah maupun pelaksanaan program dan kegiatan dalam rencana kerja yang telah ditetapkan.

Beberapa hal yang menyebabkan rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021 perlu melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap target kinerja kegiatan beserta pagu indikatifnya adalah:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
2. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka diperlukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

Penyesuaian kegiatan yang dilakukan pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021 tetap dengan memperhatikan target kinerja pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021-2026.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan dokumen ini. Kami menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021, sehingga dokumen ini dapat tersusun dan kami berharap semoga dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021 dapat bermanfaat.

Pematang Jaya, Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



Dr. Ap. Ir. MOHAMAD ARIFIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660301 199203 1 009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3. Sistematika Dokumen Perubahan Renja Setda Kabupaten Pematang Jaya.....	3
1.4. Maksud Dan Tujuan.....	4
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	5
2.2. Permasalahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021	5
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	27
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	27
3.2. Kebijakan Anggaran Daerah	28
3.3. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah	29
3.4. Program Dan Kegiatan.....	30
BAB VI PENUTUP	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Realisasi Kinerja dan Anggaran Setda Kabupaten Pemalang.....	5
Tabel 2. 2 Realisasi Program dan Kegiatan Sampai Dengan Triwulan II 2021	7
Tabel 3. 1 Usulan Program Dan Kegiatan Anggaran Perubahan.....	34



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan proses dinamis dan berkesinambungan yang dalam implementasinya harus menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, permasalahan, dan isu strategis terkini. Perkembangan dan dinamika kondisi perekonomian, kebijakan nasional maupun daerah membutuhkan penyesuaian, menyebabkan perencanaan pembangunan juga perlu untuk dilakukan penyesuaian.

Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya telah menetapkan RKPD Tahun 2021 melalui Peraturan Bupati No 39 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021. Hal tersebut diikuti oleh semua Perangkat Daerah untuk menetapkan dokumen perencanaan tahunan. Setda Kabupaten Pematang Jaya telah menetapkan Renja Tahun 2021 melalui keputusan Sekretaris Daerah Nomor 188.4/24/Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021. Perubahan dokumen perencanaan tahunan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Renja berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pada tahun 2021 perlu disusun perubahan terhadap Renja OPD tahun dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Penyesuaian target pendapatan di tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2021;
2. Penyesuaian/rasionalisasi belanja daerah karena realisasi SiLPA tahun 2020 lebih rendah dari proyeksi yang digunakan dalam penyusunan APBD tahun 2021;
3. Rasionalisasi dan refocussing anggaran yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya.

Implikasi dari tiga hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian target pendapatan serta penyesuaian target kinerja kegiatan beserta pagu indikatifnya. Meskipun demikian, penyesuaian kegiatan dilakukan tetap dengan memperhatikan target kinerja pada Renstra Setda Kabupaten Pematang Jaya tahun 2016-2021.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
10. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
25. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

1.3. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RENJA SETDA KABUPATEN PEMALANG

Dokumen Perubahan Renja Setda Kabupaten Pemalang 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja Setda Kabupaten Pemalang Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan perangkat daerah.

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Setda Kabupaten Pemalang tahun 2021 adalah untuk menciptakan keselarasan dengan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan mengakomodir kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten untuk mengatasi isu-isu strategis terkini



BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Setda Kabupaten Pemalang merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Setda Kabupaten Pemalang. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra OPD.

Pada tahun 2021, sebagaimana telah dicantumkan dalam RKPD Kabupaten Pemalang, Setda Kabupaten Pemalang memperoleh alokasi anggaran penetapan sebesar Rp. 50.912.832.000,00, kemudian dilakukan refocusing sehingga berubah menjadi Rp. 53.235.281.400,00, dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 20.490.115.219,00 atau 32% dari total anggaran, adapun rincian alokasi dan realisasi anggaran dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 1 Realisasi Kinerja dan Anggaran Setda Kabupaten Pemalang sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S/D TRIWULAN II
BELANJA TIDAK LANGSUNG	23.900.227.000	11.543.908.238
BELANJA PEGAWAI	23.900.227.000	11.543.908.238
BELANJA LANGSUNG	27.012.605.000	8.946.206.981
BELANJA BARANG DAN JASA	24.977.326.700	7.589.779.301
BELANJA MODAL	2.035.278.300	1.356.427.680
TOTAL	50.912.832.000	20.490.115.219

2.2. Permasalahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021

Pandemi Covid 19 masih belum teratasi hingga tahun 2021, dan bahkan memerlukan upaya yang lebih besar apabila dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut cukup memberikan dampak yang besar bagi pelaksanaan kegiatan maupun anggaran belanja dan pendapatan daerah. Besarnya pos anggaran yang harus dibiayai untuk penanggulangan pandemi, pembatasan kegiatan untuk mencegah penularan yang lebih besar, merupakan faktor dan permasalahan utama yang harus disikapi Bersama untuk bisa tetap mencapai tujuan organisasi. Namun demikian terdapat permasalahan spesifik yang ditemui pada beberapa bagian Setda Kabupaten Pemalang, antara lain:

- 1) Bagian Administrasi Pembangunan;
Adanya Pandemi Covid 19 yang terjadi pada Triwulan II tahun 2021 menyebabkan banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan maupun sama sekali tidak dapat dilakukan. Namun demikian, hal tersebut masih dapat diatasi, dan tidak mengganggu kinerja Perangkat Daerah karena tugas utamanya adalah sebagai fungsi koordinatif.
- 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat:
 - a. Pembatalan pemberangkatan kegiatan ibadah haji sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 660 TAHUN 2021 tentang Pembatalan Pemberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M. Menyikapi hal tersebut, anggaran untuk fasilitasi pemberangkatan haji, telah dialihkan untuk anggaran penanganan Covid 19.
 - b. Adanya larangan untuk melakukan kegiatan yang melibatkan kerumunan, menyebabkan fasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan batal dilaksanakan. Adapun kegiatan tersebut antara lain Kegiatan Tarawih Silaturahmi, Pengajian bulan Ramadhan, dan kegiatan Pengajian Rutin Istighozah Kliwonan yang semua anggarannya dialihkan/digeser ke kegiatan MTQ dan HSN (Hari Santri Nasional) yang pelaksanaannya direncanakan bulan September dan Oktober.
- 3) Bagian Perekonomian dan SDA
Mendasarkan Surat Mendagri Nomor 906/923/keuda tanggal 5 Februari 2021 perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH-CHT, DAK Fisik, DAK Non fisik untuk Kegiatan PK2UKM, B2LPS, BOKB, dan FPM dan DID, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3808 Tahun 2020, membawa implikasi peralihan penempatan anggaran pada Sub Kegiatan sebagaimana hasil inventarisir dan pemetaan kepada Bagian Perekonomian dan SDA dari Perangkat Daerah pengampu sebelumnya. Sampai dengan Triwulan II tahun 2021. Rendahnya pencapaian kinerja disebabkan masih menunggu penyusunan petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis untuk pelaksanaan pembagian BLT.

Adapun realisasi Renja Setda Sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 2 Realisasi Program dan Kegiatan Sampai Dengan Triwulan II 2021

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	ANGGARAN 2021 PENETAPAN	ANGGARAN 2021 REFOKUSING	CAPAIAN KNJ. s/d TW. II (%)	REALISASI ANG. s/d TW. II	CAPAIAN ANG. s/d TW. II (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01. 01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.									
4.01. 01. 2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
4.01. 01. 2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	6	50.000.000	50.000.000	4	16.458.200,00	32,92	
4.01. 01. 2.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKjIP Setda Kabupaten Pemalang yang disusun.	Dokumen	1	101.220.000	121.493.000	1	16.196.654,00	13,33	
		Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah yang disusun.	Dokumen	3			2			
		Jumlah dokumen Renstra Setda Kabupaten Pemalang yang disusun.	Dokumen	1			0			
		Jumlah dokumen Renja Setda Kabupaten Pemalang yang disusun.	Dokumen	2			0			
		Jumlah dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat Daerah yang disusun.	Dokumen	1			0			
4.01. 01. 2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
4.01. 01. 2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Setda yang dilaksanakan.	Kali	12	22.310.909.000	22.310.909.000	6	11.196.162.520,00	50,18	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	ANGGARAN 2021 PENETAPAN	ANGGARAN 2021 REFOKUSING	CAPAIAN KNJ. s/d TW. II (%)	REALISASI ANG. s/d TW. II	CAPAIAN ANG. s/d TW. II (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Setda yang dilaksanakan.	Kali	1			1			
		Pembayaran Gaji ke 13 ASN Setda yang dilaksanakan.	Kali	1			1			
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen keuangan sekretariat daerah yang diverifikasi.	Dokumen	10.000	846.680.000	851.080.000	5.000	1.471.250,00	0,17	
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Setda yang disusun.	Dokumen	1	12.000.000	12.000.000	1	1.780.000,00	14,83	
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Setda yang disusun.	Dokumen	1	9.000.000	9.000.000	0	0,00	0,00	
4.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen RKBMD dan RKPBM Sekretariat daerah yang disusun.	Dokumen	2	16.000.000	16.000.000	0	0,00	0,00	
4.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas KDH / WKDH khusus hari-hari tertentu yang dibeli.	Pcs	472	64.200.000	64.200.000	272	52.501.850,00	81,78	
4.01.01.2.05.03	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai setda yang terfasilitasi urusan kepegawaiannya.	Orang	50	20.000.000	20.000.000	20	0,00	0,00	
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah.	Orang	70	475.000.000	440.600.000	0	176.560.000,00	40,07	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	ANGGARAN 2021 PENETAPAN	ANGGARAN 2021 REFOKUSING	CAPAIAN KNJ. s/d TW. II (%)	REALISASI ANG. s/d TW. II	CAPAIAN ANG. s/d TW. II (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah peserta yang mengikuti workshop pengelola keuangan daerah.	Orang	48			40			
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan.	Orang	20	100.000.000	100.000.000	0	0,00	0,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat - alat listrik di lingkungan sekretariat daerah yang tersedia.	Jenis	30	380.000.000	375.000.000	3	288.253.000,00	76,87	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor di lingkungan Setda yang tersedia.	Jenis	20	75.000.000	75.000.000	30	70.921.400,00	94,56	
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga di lingkungan Setda yang tersedia.	Jenis	87	100.000.000	100.000.000	20	53.402.000,00	53,40	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pengisian tabung pemadam kebakaran pada sekretariat daerah Setda yang dilakukan.	Tabung	8	75.000.000	75.000.000	87	26.950.000,00	35,93	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia.	Jenis	8	190.100.000	190.100.000	8	99.038.000,00	52,10	
		Jumlah penggandaan yang tersedia.	Lembar	36.000			18000			
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan di lingkungan Sekretariat daerah yang tersedia.	Exemplar	1.500	233.000.000	233.000.000	750	110.925.000,00	47,61	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu Bupati /Pemda Pematang yang melakukan	Orang	300	480.000.000	494.500.000	300	122.447.159,00	24,76	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	ANGGARAN 2021 PENETAPAN	ANGGARAN 2021 REFOKUSING	CAPAIAN KNJ. s/d TW. II (%)	REALISASI ANG. s/d TW. II	CAPAIAN ANG. s/d TW. II (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		kunjungan kerja yang terfasilitasi.								
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat kordinasi dan konsultasi di dalam dan di luar daerah yang dilakukan.	Kegiatan	338	1.894.724.600	1.432.014.600	150	216.877.851,00	15,14	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dibeli.	Unit	9	271.650.000	261.775.000	0	0,00	0,00	
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeler pada sekretariat daerah yang dibeli.	Jenis	30	380.460.000	322.607.625	30	310.156.740,00	96,14	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor lainnya yang dibeli.	Unit	49	698.930.000	866.506.400	18	544.400.000,00	62,83	
		Jumlah komputer dan perlengkapannya yang dibeli.	Unit	19			3			
		Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipenuhi.	Jenis	13			13			
		Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang dibeli.	Jenis	11			11			
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat Keluar dan surat masuk yang teradministrasi.	Surat	6.000	55.000.000	55.000.000	3.000	20.233.000,00	36,79	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	ANGGARAN 2021 PENETAPAN	ANGGARAN 2021 REFOKUSING	CAPAIAN KNJ. s/d TW. II (%)	REALISASI ANG. s/d TW. II	CAPAIAN ANG. s/d TW. II (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01. 01. 2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada setda yang dibayar.	Kali	12	1.382.000.000	1.382.000.000	6	412.646.547,00	29,86	
4.01. 01. 2.08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kegiatan yang difasi litasi dengan sewa peralatan dan perlengkapan Kantor.	Kegiatan	101	750.000.000	649.180.000	50	353.596.000,00	54,47	
4.01. 01. 2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honor 11 orang tenaga IT, 6 orang tenaga sarpras dan 41 orang tenaga administrasi yang dibayar.	Kali	12	1.906.354.000	1.934.735.288	6	925.504.669,00	47,84	
		Jumlah honor 25 orang tenaga driver yang dibayar.	Kali	12			6			
		Jumlah honor 30 orang tenaga kebersihan yang dibayar.	Kali	12			6			
		Jumlah honor 36 orang tenaga keamanan di lingkungan setda yang dibayar.	Kali	12			6			
4.01. 01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
4.01. 01. 2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan KDH / WKDH Pemalang yang terpelihara.	Unit	6	318.612.000	318.612.000	3	112.585.398,00	35,34	
4.01. 01. 2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang mendapat perijinan KIR dan STNK.	Unit	165	1.000.000.000	1.000.000.000	85	525.934.289,00	52,59	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	ANGGARAN 2021 PENETAPAN	ANGGARAN 2021 REFOKUSING	CAPAIAN KNJ. s/d TW. II (%)	REALISASI ANG. s/d TW. II	CAPAIAN ANG. s/d TW. II (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara secara rutin/ berkala.	Unit	165			85			
4.01. 01. 2.09. 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeler pada sekretariat daerah yang dipelihara.	Unit	40	100.000.000	100.000.000	20	59.925.000,00	59,93	
4.01. 01. 2.09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara secara rutin/ berkala.	Unit	2	856.198.600	1.022.595.306	2	472.634.600,00	46,22	
		Jumlah rumah dinas yang dipelihara secara rutin/ berkala.	Unit	3			1			
		Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/ berkala.	Unit	4			0			
4.01. 01. 2.09. 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara.	Jenis	10	285.000.000	218.500.000	10	127.484.409,00	58,35	
		Terpenuhinya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan rumah jabatan/ dinas.	Bulan	12			6			
		Terpenuhinya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan rumah jabatan/dinas.	Bulan	12			6			
		Terpenuhinya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor.	Bulan	12			6			
4.01. 01. 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	ANGGARAN 2021 PENETAPAN	ANGGARAN 2021 REFOKUSING	CAPAIAN KNJ. s/d TW. II (%)	REALISASI ANG. s/d TW. II	CAPAIAN ANG. s/d TW. II (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01. 01. 2.11. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH /WKDH yang dilaksanakan.	Kali	12	785.318.000	785.318.000	6	347.745.718,00	44,28	
		Pembayaran Tunjangan Hari Raya KDH /WKDH yang dilaksanakan.	Kali	1			1			
		Pembayaran Gaji ke 13 KDH /WKDH yang dilaksanakan.	Kali	1			1			
4.01. 01. 2.11. 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pakaian Dinas KDH/ WKDH Pemalang yang dibeli.	Pcs	50	305.000.000	305.000.000	25	66.800.000,00	21,90	
4.01. 01. 2.11. 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Medical Cek up KDH /WKDH Pemalang dan keluarga yang terfasilitasi.	Orang	8	88.500.000	88.500.000	0	0,00	0,00	
4.01. 01. 2.12	Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah									
4.01. 01. 2.12. 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Pemalang yang tersedia.	Bulan	12	2.457.185.450	2.612.646.193	6	909.363.324,00	34,81	
		Jumlah dialog/ audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan yang dilakukan.	Kali	2			2			
		Jumlah kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah yang dilakukan.	Kali	60			40			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	ANGGARAN 2021 PENETAPAN	ANGGARAN 2021 REFOKUSING	CAPAIAN KNJ. s/d TW. II (%)	REALISASI ANG. s/d TW. II	CAPAIAN ANG. s/d TW. II (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya yang dilakukan.	Kali	50			20			
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Pemalang yang tersedia.	Bulan	12	1.251.640.500	1.683.089.338	6	606.460.312,00	36,03	
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah kebutuhan Rumah Tangga Setda Kab. Pemalang yang tersedia.	Bulan	12	1.005.000.000	1.005.000.000	6	418.414.600,00	41,63	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi									
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah peraturan tentang kelembagaan pemerintah daerah yang disusun (evaluasi SOTK).	Dokumen	2	390.695.500	390.695.500	0	61.732.939,00	15,80	
		Jumlah dokumen Standar Kompetensi Manajerial, evaluasi analisis jabatan struktural, evaluasi jabatan fungsional umum yang tersusun.	Dokumen	2			0			
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah KTP PNS yang dibuat untuk kelengkapan pakaian dinas.	Emblem	1.500	339.831.900	339.831.900	662	62.686.014,00	18,45	
		Jumlah raperbup tentang ketatalaksanaan yang disusun.	Dokumen	1			0			
		Jumlah unit pelayanan publik yang dibina.	Unit	20			20			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	ANGGARAN 2021 PENETAPAN	ANGGARAN 2021 REFOKUSING	CAPAIAN KNJ. s/d TW. II (%)	REALISASI ANG. s/d TW. II	CAPAIAN ANG. s/d TW. II (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah unit pelayanan publik yang difasilitasi SKM.	Unit	10			9			
		Jumlah proposal inovasi pelayanan publik untuk KIPP tingkat Nasional yang difasilitasi penyusunannya.	Dokumen	6			3			
		Jumlah kegiatan kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan.	Kegiatan	1			0			
4.01. 01. 2.13. 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi.	Peserta	60	185.382.000	185.382.000	0	63.755.817,00	34,39	
		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Reformasi Birokrasi.	Peserta	120			0			
		Jumlah unit kerja yang diusulkan mengikuti seleksi WBK.	Unit	5			5			
		Jumlah kelompok budaya kerja yang terbentuk.	Kelompok	27			0			
4.01. 01. 2.13. 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Layanan TNDE yang tersedia.	Bulan	12	338.298.000	238.298.000	6	29.647.755,00	12,44	
		Jumlah laporan evaluasi SOP.	Laporan	1			0			
		Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dalam penyusunan SOP Perangkat Daerah.	Perangkat Daerah	10			10			
4.01. 01. 2.13. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah PK Bupati dan LKjIP Pemerintah Daerah yang tersusun.	Dokumen	2	185.382.000	185.382.000	2	16.420.750,00	8,86	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	ANGGARAN 2021 PENETAPAN	ANGGARAN 2021 REFOKUSING	CAPAIAN KNJ. s/d TW. II (%)	REALISASI ANG. s/d TW. II	CAPAIAN ANG. s/d TW. II (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah dokumen IKU Kabupaten dan IKU Perangkat Daerah yang tersusun.	Dokumen	1			0			
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan									
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah kegiatan KDH/ WKDH yang difasilitasi keprotokolannya.	Kegiatan	350	285.739.500	259.603.900	176	103.473.244,00	39,86	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah naskah / materi sambutan kegiatan pimpinan yang disusun.	Naskah	350	197.083.500	148.219.100	176	16.579.000,00	11,19	
		Jumlah buku katalog sambutan pimpinan yang disusun.	Buku	20			0			
		Jumlah kegiatan pembinaan oleh pimpinan yang diselenggarakan.	Kegiatan	2			0			
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah kegiatan KDH/ WKDH Pemalang yang didokumentasikan dan dipublikasikan.	Kegiatan	350	308.196.600	283.196.600	176	85.528.950,00	30,20	
4.01.02.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.									
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan									
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah yang dilaksanakan.	Kali	4	191.559.400	161.559.400	2	36.420.600,00	22,54	
		Jumlah fasilitasi kegiatan PAW anggota DPRD Kab. Pemalang yang dilaksanakan.	Kali	1			1			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	ANGGARAN 2021 PENETAPAN	ANGGARAN 2021 REFOKUSING	CAPAIAN KNJ. s/d TW. II (%)	REALISASI ANG. s/d TW. II	CAPAIAN ANG. s/d TW. II (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Kecamatan yang dimonitoring dan dievaluasi dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).	Kecamatan	14			0			
		Jumlah data monografi kecamatan smester II tahun 2020 dan smester I Th. 2021.	Dokumen	2			0			
		Jumlah Kelurahan yang diberikan pembinaan dan pengawasan penggunaan dana alokasi kelurahan.	Kelurahan	11			0			
4.01. 02. 2.01. 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Nama Rupabumi yang dibakukan.	Obyek	10	125.465.600	95.465.600	8	16.877.471,00	17,68	
		Jumlah pilar batas daerah yang dipelihara.	Pilar	15			0			
4.01. 02. 2.01. 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disusun.	Dokumen	1	226.350.000	216.350.000	1	155.062.245,00	71,67	
		Jumlah kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang dilaksanakan.	Kegiatan	1			0			
		Jumlah dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) yang disusun.	Dokumen	1			1			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	ANGGARAN 2021 PENETAPAN	ANGGARAN 2021 REFOKUSING	CAPAIAN KNJ. s/d TW. II (%)	REALISASI ANG. s/d TW. II	CAPAIAN ANG. s/d TW. II (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah dokumen laporan evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disusun.	Dokumen	1			1			
4.01. 02. 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat									
4.01. 02. 2.02. 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah rakor persiapan tarhim.	Kali	1	1.720.266.550	1.265.468.550	1	201.559.500,00	15,93	
		Jumlah kegiatan tarawih dan silaturahmi forkompimda yang terlaksana.	Kegiatan	7			7			
		Jumlah kegiatan peringatan hari besar islam (PHBI) Isro mi'roj, maulid nabi, tahun baru islam, nuzulul qur'an, idul fitri, idul adha dan hari santri nasional yang terlaksana.	Kegiatan	7			3			
		Jumlah kegiatan pengajian rutin bulanan, istighozah dan bulan ramadhan yang terlaksana.	Kegiatan	20			5			
		Jumlah kegiatan pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten dan terkirimnya utusan peserta MTQ ke tingkat Provinsi dan Nasional yang terfasilitasi.	Kegiatan	17			0			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	ANGGARAN 2021 PENETAPAN	ANGGARAN 2021 REFOKUSING	CAPAIAN KNJ. s/d TW. II (%)	REALISASI ANG. s/d TW. II	CAPAIAN ANG. s/d TW. II (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah petugas haji daerah (TPHD) dan petugas kesehatan haji daerah (TKHD) yang terfasilitasi dan terkirim ke tanah suci mekah.	Orang	6			0			
		Jumlah forum silaturahmi Forkompinda dengan jamaah haji yang diselenggarakan.	Kali	2			0			
		Jumlah transportasi operasional pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji yang tersedia.	Bus	16			0			
		Jumlah fasilitasi makan minum pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji.	Kegiatan	2			0			
		Jumlah kegiatan pembinaan dan pemberdayaan lembaga/ ormas keagamaan.	Kegiatan	1			0			
		Jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan keagamaan yang dilaksanakan.	Kali	12			6			
4.01. 02. 2.02. 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah kegiatan rakor pelaksanaan kebijakan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan.	Kali	2	221.040.000	196.040.000	0	55.477.800,00	28,30	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	ANGGARAN 2021 PENETAPAN	ANGGARAN 2021 REFOKUSING	CAPAIAN KNJ. s/d TW. II (%)	REALISASI ANG. s/d TW. II	CAPAIAN ANG. s/d TW. II (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah sosialisasi di bidang sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan.	Kali	1			0			
		Jumlah kegiatan pembinaan ormas sosial kemasyarakatan dan terfasilitasinya tim POM Kab. Pemalang.	Kegiatan	0			0			
		Jumlah rakor monev bansos / hibah lembaga sosial kemasyarakatan.	Kali	0			0			
4.01. 02. 2.02. 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah monitoring ODMK dan pembinaan keluarga eks psikotikatan.	Kali	1	235.000.000	210.000.000	0	52.810.100,00	25,15	
		Jumlah kegiatan rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan.	Kegiatan	2			1			
		Jumlah penyuluhan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.	Kali	1			0			
4.01. 02. 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum									
4.01. 02. 2.03. 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Propemperda yang disusun dalam 1 tahun (Surat Bupati tentang Propemperda Tahun 2022).	Surat Bupati	1	438.280.800	418.280.800	0	156.938.960,00	37,52	
		Jumlah Pra Raperda menjadi Raperda di eksekutif.	Raperda	12			6			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	ANGGARAN 2021 PENETAPAN	ANGGARAN 2021 REFOKUSING	CAPAIAN KNJ. s/d TW. II (%)	REALISASI ANG. s/d TW. II	CAPAIAN ANG. s/d TW. II (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Raperda menjadi Perda dalam 1 tahun.	Perda	12			0			
		Jumlah sosialisasi rancangan produk hukum daerah.	Sosialisasi	3			1			
		Pembuatan Sistem Ecorre.	Buah	1			1			
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang disinkronisasi dan diharmonisasi.	PHD	780			480			
4.01. 02. 2.03. 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Unit Bantuan Hukum yang dibentuk untuk menyelesaikan perkara.	Perkara	6	582.909.000	545.909.000	0	114.244.151,00	20,93	
		Jumlah Unit Bantuan Hukum yang dibentuk untuk menyelesaikan perkara bagi masyarakat miskin.	Perkara	8			0			
		Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani.	Permasalahan	12			17			
		Jumlah legal opinion dalam satu tahun.	LO	4			0			
		Jumlah kelompok peserta lomba kadarkum.	Kelompok	0			0			
		Jumlah kelompok kadarkum yang dibentuk/ dibina.	Kelompok	6			3			
		Jumlah desa sadar hukum yang dibentuk.	Desa	14			0			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	ANGGARAN 2021 PENETAPAN	ANGGARAN 2021 REFOKUSING	CAPAIAN KNJ. s/d TW. II (%)	REALISASI ANG. s/d TW. II	CAPAIAN ANG. s/d TW. II (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi aksi HAM dan Kabupaten/Kota peduli HAM.	Orang	45			45			
		Jumlah laporan pelaksanaan aksi HAM yang disusun.	Laporan	3			0			
		Jumlah laporan data peduli HAM yang disusun.	Laporan	1			0			
		Jumlah kegiatan penyuluhan peraturan perundang-undangan di desa dalam 1 tahun.	Kegiatan	6			0			
		Jumlah kelompok peserta lomba dalam penyuluhan hukum.	Kelompok	14			0			
4.01. 02. 2.03. 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah kegiatan sosialisasi Produk Hukum Daerah dalam 1 tahun.	Kegiatan	14	852.200.000	809.200.000	14	201.067.500,00	24,85	
		Jumlah buku produk hukum daerah yang dicetak.	Buku	9.000			0			
		Jumlah produk hukum yang dipublikasikan.	Buku	40			0			
		Jumlah sosialisasi JDIH untuk desa.	Sosialisasi	4			0			
		Bintek JDIH untuk 14 desa percontohan.	Kali	1			1			
		Jumlah rakor JDIH Tingkat Kabupaten.	Kegiatan	2			1			
		Jumlah Buku Referensi yang dibeli.	Buku	20			6			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	ANGGARAN 2021 PENETAPAN	ANGGARAN 2021 REFOKUSING	CAPAIAN KNJ. s/d TW. II (%)	REALISASI ANG. s/d TW. II	CAPAIAN ANG. s/d TW. II (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah pameran JDIH yang dilaksanakan.	Kegiatan	1			0			
		Jumlah publikasi di media masa.	Kali	15			7			
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang dikaji.	PH Daerah	5			1			
		Jumlah Produk Hukum Desa yang diklarifikasi.	PH Desa	100			27			
4.01. 02. 2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah									
4.01. 02. 2.04. 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Regulasi yang mengatur Kerja Sama Daerah / Sinergi yang disusun.	Buah	0	317.665.000	287.665.000	0	74.939.159,00	26,05	
		Jumlah Data Penggalan / Pemetaan Kerja Sama Daerah.	Data	1			0			
		Jumlah Koordinasi Kerja Sama Wajib yang dilaksanakan.	Kabupaten	4			0			
		Jumlah Sosialisasi regulasi yang mengatur Kerja Sama Daerah / Sinergi.	Kali	0			0			
		Jumlah Naskah/ Dokumen Kerja Sama / Sinergi yang disusun.	Dokumen	15			15			
4.01. 02. 2.04. 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Daerah / Sinergi.	Kali	1	30.000.000	30.000.000	0	0,00	0,00	
4.01. 03.	Program Perekonomian dan Pembangunan.									

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	ANGGARAN 2021 PENETAPAN	ANGGARAN 2021 REFOKUSING	CAPAIAN KNJ. s/d TW. II (%)	REALISASI ANG. s/d TW. II	CAPAIAN ANG. s/d TW. II (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01. 03. 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian									
4.01. 03. 2.01. 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah pemantauan pembinaan terhadap pengurusan BUMD dan BLUD.	Kali	14	255.845.000	325.845.000	6	62.826.760,00	19,28	
		Jumlah raperda penyertaan modal pemerintah daerah.	Raperda	1			0			
4.01. 03. 2.01. 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah pelaksanaan kormonevlap DBHCHT.	Kali	12	527.794.000	500.704.700	5	40.901.490,00	8,17	
		Jumlah pelaksanaan rakor TPID dan pelaksanaan kormonevlap TPID.	Kali	6			3			
		Jumlah pelaksanaan rakor ekuinda dan pelaksanaan kormonevlap ekuinda.	Kali	6			4			
4.01. 03. 2.01. 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah kormonevlap perkoperasian dan UMKM.	Kali	6	81.947.000	51.947.000	3	4.263.200,00	8,21	
4.01. 03. 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan									
4.01. 03. 2.02. 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Analisa Standar Belanja (ASB) yang disusun.	Dokumen	1	205.230.000	205.230.000	0	13.742.000,00	6,70	
		Jumlah dokumen Satuan Standarisasi Harga (SSH) yang disusun.	Dokumen	3			2			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	ANGGARAN 2021 PENETAPAN	ANGGARAN 2021 REFOKUSING	CAPAIAN KNJ. s/d TW. II (%)	REALISASI ANG. s/d TW. II	CAPAIAN ANG. s/d TW. II (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01. 03. 2.02. 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Rakor pengendalian kegiatan SKPD di Kabupaten Pemalang yang dilaksanakan.	Kali	6	37.388.950	36.464.950	3	4.500.000,00	12,34	
4.01. 03. 2.02. 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan hasil-hasil pembangunan yang disusun.	Laporan	1	229.360.800	110.011.800	0	15.947.000,00	14,50	
4.01. 03. 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa									
4.01. 03. 2.03. 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Fasilitasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui tender/ seleksi.	Kali	80	417.575.000	317.575.000	66	87.825.024,00	27,65	
4.01. 03. 2.03. 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah kegiatan desk Rencana Umum Pengadaan (RUP).	Kali	2	298.500.000	272.291.400	1	64.167.800,00	23,57	
		Jumlah sewa colocation back up server LPSE.	Kali	1			1			
		Jumlah penayangan paket pengadaan barang dan jasa (Tender) lewat LPSE.	Paket	80			66			
		Jumlah penyediaan layanan ISP untuk LPSE.	Bulan	12			6			
4.01. 03. 2.03. 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah personil UKPBJ pengadaan barang dan jasa yang mengikuti pelatihan.	Orang	15	142.500.000	142.500.000	0	12.773.000,00	8,96	
		Jumlah pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa yang dinilai angka kreditnya.	Orang	8			2			

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	ANGGARAN 2021 PENETAPAN	ANGGARAN 2021 REFOKUSING	CAPAIAN KNJ. s/d TW. II (%)	REALISASI ANG. s/d TW. II	CAPAIAN ANG. s/d TW. II (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah peserta peningkatan kualitas teknis Sekretariat dan pokja UKPBJ.	Orang	25			0			
		Jumlah terselenggaranya Pendampingan Hukum PBJ.	Bulan	12			6			
4.01. 03. 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam									
4.01. 03. 2.04. 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah pelaksanaan kormpnevlap KP3 dan PPTR.	Kali	12	74.175.000	3.304.673.650	6	6.010.000,00	0,18	
		Jumlah Pelaksanaan Investigasi/identifikasi	Kali	200			0			
		Pengumpulan data informasi peredaran cukai ilegal	Kali	200			0			
		Jumlah penerima manfaat BLT bagi Buruh / Petani Tembakau	Orang	600			0			
4.01. 03. 2.04. 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah pelaksanaan Kormonevlap perlindungan pengelolaan dan konservasi sumber daya alam.	Kali	8	71.198.750	50.238.800	3	2.862.500,00	5,70	
4.01. 03. 2.04. 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah pelaksanaan Kormonevlap dalam pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan.	Kali	12	70.290.000	70.290.000	5	5.245.000,00	7,46	
					50.912.832.000	53.235.281.400	39,50	20.490.115.219,00	38,49	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pandemi Covid 19 telah banyak memberikan dampak dan pengaruh terhadap segala aspek kehidupan masyarakat. Dampak yang paling dirasakan salah satunya dalam bidang perekonomian. Dimana dengan adanya kebijakan social distancing maupun pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan beberapa daerah untuk mengurangi penyebaran Covid 19, mengakibatkan terhentinya produksi yang diikuti dengan pengurangan jumlah tenaga dan berhentinya kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini sangat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan Indonesia.

Untuk menyikapi hal tersebut, pemerintah mengambil berbagai kebijakan untuk bisa menekan laju penyebaran Covid 19 dan mempertahankan roda perekonomian masyarakat, melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengeluarkan kebijakan keuangan sebagai berikut:

1. Pelonggaran batasan defisit anggaran (APBN) hingga tahun 2022 untuk kemudian dinormalkan kembali maksimal 3 persen PDB;
2. Realokasi anggaran dan refocusing belanja kepada kegiatan penanggulangan Covid-19;
3. Penyesuaian belanja wajib di bidang kesehatan, anggaran dana desa, dan Dana Alokasi Umum;
4. Peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas usaha;
5. Penyesuaian kebijakan pembiayaan anggaran dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemic Covid-19.

Selain menetapkan peraturan, Presiden RI juga telah memberikan Enam arahan Presiden dalam rangka membendung Covid-19 sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengujian sampel secara masif dan melaksanakan isolasi secara ketat terhadap orang dalam pemantauan serta pasien dalam pengawasan;
2. Memanfaatkan teknologi informasi berupa aplikasi kesehatan atau telemedicine, sehingga orang tidak perlu bertemu dengan dokter atau ke rumah sakit;
3. Melakukan komunikasi secara efektif dan transparan kepada publik dengan detil dan baik;
4. Menegakkan hukum dengan bantuan aparat negara, sehingga masyarakat memiliki kedisiplinan yang kuat dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19;

5. Menjaga kelancaran distribusi logistik yang dibutuhkan masyarakat dalam kebijakan tanggap darurat, baik kelancaran logistik dari pusat ke daerah maupun dari gudang-gudang logistik ke daerah;
6. Melaksanakan stimulus ekonomi secara tepat sasaran dalam rangka pemutusan rantai penyebaran Covid-19.

3.2. KEBIJAKAN ANGGARAN DAERAH

Kebijakan tersebut diikuti dengan kebijakan anggaran di Kabupaten Pematang Jaya dengan *Refocusing* (pengutamaan penggunaan alokasi kegiatan tertentu) dan perubahan alokasi anggaran diarahkan melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2021. Penggunaan BTT diarahkan pada prioritas utama meliputi:

1. Penanganan Kesehatan. Berupa belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi *Covid-19*, antara lain berupa pengadaan alat pelindung diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien *Covid-19*.
2. Penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net; antara lain melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi *Covid-19*.
3. Stimulus ekonomi bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pelaku usaha. Alokasi ini ditujukan untuk penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup. Antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi perekonomian di daerah.

Penyesuaian Belanja Daerah ditempuh melalui rasionalisasi pada semua jenis belanja baik belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal, sebagai berikut:

1. Rasionalisasi Belanja Pegawai, terutama dilakukan penyesuaian besaran tambahan penghasilan ASN, mengendalikan/mengurangi honorarium kegiatan/ honorarium pengelola dana BOS, dan/atau mengendalikan/mengurangi pemberian uang lembur dengan mempertimbangkan kebutuhan riil pelaksanaan pekerjaan yang bersifat mendesak dan dilakukan secara selektif.
2. Rasionalisasi Belanja Barang/Jasa, dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk, antara lain perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, barang pakai habis untuk keperluan kantor, cetak dan penggandaan, makanan dan minuman, serta paket rapat di kantor dan di luar kantor.

3. Rasionalisasi Belanja Modal, dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk, antara lain pengadaan kendaraan dinas/operasional, pengadaan mesin dan alat berat, dan/atau pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya.

Hasil penyesuaian Belanja Daerah tersebut, digunakan untuk mendanai:

1. Belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, antara lain berupa pengadaan alat pelindung diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kepadamasyarakat, dan penanganan pasien COVID-19
2. Penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net, antara lain melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi COVID-19; dan/atau
3. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah.

3.3. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang merupakan penjabaran dari Prioritas Pembangunan Kabupaten Pemalang. Dalam menentukan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang tidak terlepas dari Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang. Secara rinci Tujuan dan Sasaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

Tujuan :

“Meningkatkan layanan administrasi penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, kualitas peraturan perundang-undangan daerah dan kebijakan di sektor ekonomi yang lebih produktif dan kompetitif”.

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah;
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
4. Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah;
5. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kerukunan hidup antar umat beragama;
6. Meningkatnya pengendalian pembangunan daerah;
7. Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah;

8. Meningkatnya perkembangan perekonomian, usaha daerah dan sektor informal yang lebih produktif dan kompetitif melalui kerjasama dan iklim investasi yang baik.

3.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang merupakan pelaksanaan dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang yang dilakukan melalui pemenuhan target Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.

Program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 mengacu pada Renstra Perangkat Daerah serta RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2021. Program dan kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai arah kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta terjaminnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan pada Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 adalah sebanyak 3 program, 20 kegiatan, dan 68 subkegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 53.235.281.400,00 (lima puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Program dan kegiatan tersebut diampu oleh 9 (sembilan) Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) **PROGRAM ADMINISTRASI UMUM**
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- i. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- j. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

- k. Penataan Organisasi
 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
- l. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - Fasilitasi Keprotokolan
 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan
- 2) **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**
 - a. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
 - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
 - c. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
 - d. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
- 3) **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**
 - a. Administrasi Tata Pemerintahan
 - Penataan Administrasi Pemerintahan
 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
 - b. Fasilitasi Kerjasama Daerah
 - Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
 - c. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial

- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
- d. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
 - Fasilitasi Bantuan Hukum
 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

Berikut adalah rincian usulan kegiatan yang akan dibiayai melalui Anggaran Perubahan Tahun 2021.



Tabel 3. 1 Usulan Program Dan Kegiatan Anggaran Perubahan Tahun 2021

KODE PROG./ KEG.		KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/(BERKURANG)	%
1	2	3	4	5		6	7	8	9
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				151.220.000,00	171.493.000,00	20.273.000,00	13,41
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang tersedia (RKA, RKAP, DPA, DPPA)	6	Dok	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKjIP Setda Kabupaten Pemalang yang disusun.	1	Dok	101.220.000,00	121.493.000,00	20.273.000,00	20,03
			Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah yang disusun.	3	Dok				
			Jumlah dokumen Renstra Setda Kabupaten Pemalang yang disusun.	1	Dok				
			Jumlah dokumen Renja Setda Kabupaten Pemalang yang disusun.	2	Dok				
			Jumlah dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat Daerah yang disusun.	1	Dok				

KODE PROG./ KEG.		KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/(BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			22.374.589.000,00	23.182.989.000,00	808.400.000,00	3,61
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Setda yang dilaksanakan.	12 bln	22.310.909.000,00	22.310.909.000,00	0,00	0,00
			Pembayaran Tunjangan Hari Raya ASN Setda yang dilaksanakan.	1 kali				
			Pembayaran Gaji ke 13 ASN Setda yang dilaksanakan.	1 kali				
	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen keuangan sekretariat daerah yang diverifikasi.	10.000 Dok	42.680.000,00	851.080.000,00	808.400.000,00	1894,10
	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Setda yang disusun.	1 Dok	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen semesteran yang tersusun	1 Dok	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen RKBMD dan RKPMD Sekretariat daerah yang disusun.	2 Dok	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00

KODE PROG./ KEG.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/(BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			659.200.000,00	624.800.000,00	-34.400.000,00	-5,22
	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas KDH / WKDH khusus hari-hari tertentu yang dibeli.	297 buah	64.200.000,00	64.200.000,00	0,00	0,00
	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai setda yang terfasilitasi urusan kepegawaiannya.	50 orang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah.	70	475.000.000,00	440.600.000,00	-34.400.000,00	-7,24
			Jumlah peserta yang mengikuti workshop pengelola keuangan daerah.	48				
	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti Bintek Implementasi Peraturan Perundang-undangan.	20	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
6		Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.427.824.600,00	2.974.614.600,00	-453.210.000,00	-13,22
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat – alat listrik di lingkungan sekretariat daerah yang tersedia.	30 jenis	380.000.000,00	375.000.000,00	-5.000.000,00	-1,32
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor di lingkungan Setda yang tersedia.	20 jenis	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00

KODE PROG./ KEG.		KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/(BERKURANG)	%
1	2	3	4	5		6	7	8	9
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga di lingkungan Setda yang tersedia.	87	jenis	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pengisian tabung pemadam kebakaran pada sekretariat daerah Setda yang dilakukan.	8	tabung	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia.	8	jenis	190.100.000,00	190.100.000,00	0,00	0,00
			Jumlah penggandaan yang tersedia.	36.000	lembar				
	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan di lingkungan Sekretariat daerah yang tersedia.	1.500	exemplar	233.000.000,00	233.000.000,00	0,00	0,00
	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu Bupati /Pemda Pemalang yang melakukan kunjungan kerja yang terfasilitasi.	300	orang	480.000.000,00	494.500.000,00	14.500.000,00	3,02
	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat kordinasi dan konsultasi di dalam dan di luar daerah yang dilakukan.	338	kegiatan	1.894.724.600,00	1.432.014.600,00	-462.710.000,00	-24,42
7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.351.040.000,00	1.450.889.025,00	99.849.025,00	7,39
	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dibeli.	9	unit	271.650.000,00	261.775.000,00	-9.875.000,00	-3,64

KODE PROG./ KEG.		KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/(BERKURANG)	%
1	2	3	4	5		6	7	8	9
	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeler pada sekretariat daerah yang dibeli.	30	jenis	380.460.000,00	322.607.625,00	-57.852.375,00	-15,21
	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor lainnya yang dibeli.	49	Unit	698.930.000,00	866.506.400,00	167.576.400,00	23,98
			Jumlah komputer dan perlengkapannya yang dibeli.	19	Unit				
			Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipenuhi.	13	Jenis				
			Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang dibeli.	11	Jenis				
8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.093.354.000,00	4.020.915.288,00	-72.438.712,00	-1,77
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat Keluar dan surat masuk yang teradministrasi.	6.000	Surat	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada setda yang dibayar.	12	Kali	1.382.000.000,00	1.382.000.000,00	0,00	0,00
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kegiatan yang difasilitasi dengan sewa peralatan dan perlengkapan Kantor.	101	Kegiatan	750.000.000,00	649.180.000,00	-100.820.000,00	-13,44

KODE PROG./ KEG.		KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/(BERKURANG)	%
1	2	3	4	5		6	7	8	9
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honor 11 orang tenaga IT, 6 orang tenaga sarpras dan 41 orang tenaga administrasi yang dibayar.	12	Kali	1.906.354.000,00	1.934.735.288,00	28.381.288,00	1,49
			Jumlah honor 25 orang tenaga driver yang dibayar.	12	Kali				
			Jumlah honor 30 orang tenaga kebersihan yang dibayar.	12	Kali				
			Jumlah honor 36 orang tenaga keamanan di lingkungan setda yang dibayar.	12	Kali				
9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.559.810.600,00	2.659.707.306,00	66.540.306,00	2,60
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan KDH / WKDH Pemalang yang terpelihara.	6	Unit	318.612.000,00	318.612.000,00	-33.356.400,00	-10,47
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang mendapat perijinan KIR dan STNK.	165	Unit	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00

KODE PROG./ KEG.		KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/(BERKURANG)	%
1	2			3	4	5	6		
			Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara secara rutin/ berkala.	165	Unit				
	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeler pada sekretariat daerah yang dipelihara.	40	Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara secara rutin/ berkala.	2	Unit	856.198.600,00	1.022.595.306,00	166.396.706,00	19,43
			Jumlah rumah dinas yang dipelihara secara rutin/ berkala.	3	Unit				
			Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/ berkala.	4	Unit				
	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara.	10	Jenis	285.000.000,00	218.500.000,00	-66.500.000,00	-23,33
			Terpenuhinya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan rumah jabatan/ dinas.	12	Bulan				
			Terpenuhinya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan rumah jabatan/dinas.	12	Bulan				
			Terpenuhinya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor.	12	Bulan				

KODE PROG./ KEG.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/(BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			1.178.818.000,00	1.178.818.000,00	0,00	0,00
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH /WKDH yang dilaksanakan.	12 Kali	785.318.000,00	785.318.000,00	0,00	0,00
			Pembayaran Tunjangan Hari Raya KDH /WKDH yang dilaksanakan.	1 Kali				
			Pembayaran Gaji ke 13 KDH /WKDH yang dilaksanakan.	1 Kali				
	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pakaian Dinas KDH/ WKDH Pemalang yang dibeli.	50 Pcs	305.000.000,00	305.000.000,00	0,00	0,00
	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Medical Cek up KDH / WKDH Pemalang dan keluarga yang terfasilitasi.	8 Orang	88.500.000,00	88.500.000,00	0,00	0,00
16		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			4.713.825.950,00	5.300.735.531,00	586.909.581,00	12,45
	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Pemalang yang tersedia.	12 Bulan	2.457.185.450,00	2.612.646.193,00	155.460.743,00	6,33

KODE PROG./ KEG.		KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/(BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah dialog/ audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan yang dilakukan.	2 Kali				
			Jumlah kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah yang dilakukan.	60 Kali				
			Jumlah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya yang dilakukan.	50 Kali				
	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Pemalang yang tersedia.	12 Bulan	1.251.640.500,00	1.683.089.338,00	431.448.838,00	34,47
	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah kebutuhan Rumah Tangga Setda Kab. Pemalang yang tersedia.	12 Bulan	1.005.000.000,00	1.005.000.000,00	0,00	0,00
17		Penataan Organisasi			1.439.589.400,00	1.339.589.400,00	-100.000.000,00	-6,95
	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah peraturan tentang kelembagaan pemerintah daerah yang disusun (evaluasi SOTK).	2 Dokumen	390.695.500,00	390.695.500,00	0,00	0,00

KODE PROG./ KEG.		KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/(BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah dokumen Standar Kompetensi Manajerial, evaluasi analisis jabatan struktural, evaluasi jabatan fungsional umum yang tersusun.	2 Dokumen				
			Jumlah KTP PNS yang dibuat untuk kelengkapan pakaian dinas.	1.500 Emblem	339.831.900,00	339.831.900,00	0,00	0,00
			Jumlah raperbup tentang ketatalaksanaan yang disusun.	1 Dokumen				
			Jumlah unit pelayanan publik yang dibina.	20 Unit				
			Jumlah unit pelayanan publik yang difasilitasi SKM.	10 Unit				
			Jumlah proposal inovasi pelayanan publik untuk KIPP tingkat Nasional yang difasilitasi penyusunannya.	6 Dokumen				
			Jumlah kegiatan kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan.	1 Kegiatan				
3		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi.	60 Peserta	185.382.000,00	185.382.000,00	0,00	0,00

KODE PROG./ KEG.		KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/(BERKURANG)	%
1	2			4	5	6	7		
			Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Reformasi Birokrasi.	120	Peserta				
			Jumlah unit kerja yang diusulkan mengikuti seleksi WBK.	5	Unit				
			Jumlah kelompok budaya kerja yang terbentuk.	27	Kelompok				
	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Layanan TNDE yang tersedia.	12	Bulan	338.298.000,00	238.298.000,00	-100.000.000,00	-29,56
			Jumlah laporan evaluasi SOP.	1	Laporan				
			Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dalam penyusunan SOP Perangkat Daerah.	10	Perangkat Daerah				
	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah PK Bupati dan LKjIP Pemerintah Daerah yang tersusun.	2	Dokumen	185.382.000,00	185.382.000,00	0,00	0,00
			Jumlah dokumen IKU Kabupaten dan IKU Perangkat Daerah yang tersusun.	1	Dokumen				
18		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				791.019.600,00	691.019.600,00	-100.000.000,00	-12,64
	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah kegiatan KDH/ WKDH yang terfasilitasi keprotokolannya.	350	Kegiatan	285.739.500,00	259.603.900,00	-26.135.600,00	-9,15

KODE PROG./ KEG.		KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/(BERKURANG)	%
1	2	3	4	5		6	7	8	9
	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah naskah / materi sambutan kegiatan pimpinan yang disusun.	350	Naskah	197.083.500,00	148.219.100,00	-48.864.400,00	-24,79
			Jumlah buku katalog sambutan pimpinan yang disusun.	20	Buku				
			Jumlah kegiatan pembinaan oleh pimpinan yang diselenggarakan.	2	Kegiatan				
	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah kegiatan KDH/ WKDH Pemalang yang didokumentasi kan dan dipublikasikan.	350	Kegiatan	308.196.600,00	283.196.600,00	-25.000.000,00	-8,11
19		Administrasi Tata Pemerintahan				543.375.000,00	473.375.000,00	-70.000.000,00	-12,88
	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah yang dilaksanakan.	4	Kali	191.559.400,00	161.559.400,00	-30.000.000,00	-15,66
			Jumlah fasilitasi kegiatan PAW anggota DPRD Kab. Pemalang yang dilaksanakan.	1	Kali				
			Jumlah Kecamatan yang dimonitoring dan dievaluasi dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).	14	Kecamatan				

KODE PROG./ KEG.		KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/(BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah data monografi kecamatan smester II tahun 2020 dan smester I Th. 2021.	2 Dokumen				
			Jumlah Kelurahan yang diberikan pembinaan dan pengawasan penggunaan dana alokasi kelurahan.	11 Kelurahan				
	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Nama Rupabumi yang dibakukan.	10 Obyek	125.465.600,00	95.465.600,00	-30.000.000,00	-23,91
			Jumlah pilar batas daerah yang dipelihara.	15 Pilar				
			Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disusun.	1 Dokumen	226.350.000,00	216.350.000,00	-10.000.000,00	-4,42
	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang dilaksanakan.	1 Kegiatan				
			Jumlah dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) yang disusun.	1 Dokumen				

KODE PROG./ KEG.		KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/(BERKURANG)	%
1	2	3	4	5		6	7	8	9
			Jumlah dokumen laporan evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disusun.	1	Dokumen				
20		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				2.176.306.550,00	1.671.508.550,00	-504.798.000,00	-23,20
	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah rakor persiapan tarhim.	1	Kali	1.720.266.550,00	1.265.468.550,00	-454.798.000,00	-26,44
			Jumlah kegiatan tarawih dan silaturahmi forkompimda yang terlaksana.	7	Kegiatan				
			Jumlah kegiatan peringatan hari besar islam (PHBI) Isro mi'roj, Maulid Nabi, tahun baru islam, nuzulul qur'an, idul fitri, idul adha dan hari santri nasional yang terlaksana.	7	Kegiatan				
			Jumlah kegiatan pengajian rutin bulanan, istighozah dan bulan ramadhan yang terlaksana.	20	Kegiatan				

KODE PROG./ KEG.		KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/(BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah kegiatan pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten dan terkirimnya utusan peserta MTQ ke tingkat Provinsi dan Nasional yang terfasilitasi.	17 Kegiatan				
			Jumlah petugas haji daerah (TPHD) dan petugas kesehatan haji daerah (TKHD) yang terfasilitasi dan terkirim ke tanah suci mekah.	6 Orang				
			Jumlah forum silaturahmi Forkompinda dengan jamaah haji yang diselenggarakan.	2 Kali				
			Jumlah transportasi operasional pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji yang tersedia.	16 Bus				
			Jumlah fasilitas makan minum pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji.	2 Kegiatan				

KODE PROG./ KEG.		KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/(BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah kegiatan pembinaan dan pemberdayaan lembaga/ ormas keagamaan.	1 Kegiatan				
			Jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan keagamaan yang dilaksanakan.	12 Kali				
	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah kegiatan rakor pelaksanaan kebijakan sosial masyarakat yang dilaksanakan.	2 Kali	221.040.000,00	196.040.000,00	-25.000.000,00	-11,31
			Jumlah sosialisasi di bidang sosial masyarakat yang dilaksanakan.	1 Kali				
			Jumlah kegiatan pembinaan ormas sosial masyarakat dan terfasilitasinya tim POM Kab. Pemalang.	0 Kegiatan				
			Jumlah rakor monev bansos / hibah lembaga sosial masyarakat.	0 Kali				
3		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah monitoring ODMK dan pembinaan keluarga eks psikotikatan.	1 Kali	235.000.000,00	210.000.000,00	-25.000.000,00	-10,64

KODE PROG./ KEG.		KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/(BERKURANG)	%
1	2			3	4				
			Jumlah kegiatan rakor penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan.	2	Kegiatan				
			Jumlah penyuluhan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.	1	Kali				
21		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				1.873.389.800,00	1.773.389.800,00	-100.000.000,00	-5,34
	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Propemperda yang disusun dalam 1 tahun (Surat Bupati tentang Propemperda Tahun 2022).	Surat Bupati	1	438.280.800,00	418.280.800,00	-20.000.000,00	-4,56
			Jumlah Pra Raperda menjadi Raperda di eksekutif.	Raperda	12				
			Jumlah Raperda menjadi Perda dalam 1 tahun.	Perda	12				
			Jumlah sosialisasi rancangan produk hukum daerah.	Sosialisasi	3				
			Pembuatan Sistem Ecorre.	Buah	1				
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang disinkronisasi dan diharmonisasi.	PHD	780				

KODE PROG./ KEG.		KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/(BERKURANG)	%
1	2			3	4	5	6		
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Unit Bantuan Hukum yang dibentuk untuk menyelesaikan perkara.	Perkara	6	582.909.000,00	545.909.000,00	-37.000.000,00	-6,35
			Jumlah Unit Bantuan Hukum yang dibentuk untuk menyelesaikan perkara bagi masyarakat miskin.	Perkara	8				
			Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani.	Permasalahan	12				
			Jumlah legal opinion dalam satu tahun.	LO	4				
			Jumlah kelompok peserta lomba kadarkum.	Kelompok	0				
			Jumlah kelompok kadarkum yang dibentuk/ dibina.	Kelompok	6				
			Jumlah desa sadar hukum yang dibentuk.	Desa	14				
			Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi aksi HAM dan Kabupaten/Kota peduli HAM.	Orang	45				
			Jumlah laporan pelaksanaan aksi HAM yang disusun.	Laporan	3				

KODE PROG./ KEG.		KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/(BERKURANG)	%
1	2			3	4				
			Jumlah laporan data peduli HAM yang disusun.	Laporan	1				
			Jumlah kegiatan penyuluhan peraturan perundang-undangan di desa dalam 1 tahun.	Kegiatan	6				
			Jumlah kelompok peserta lomba dalam penyuluhan hukum.	Kelompok	14				
	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah kegiatan sosialisasi Produk Hukum Daerah dalam 1 tahun.	Kegiatan	14	852.200.000,00	809.200.000,00	-43.000.000,00	-5,05
			Jumlah buku produk hukum daerah yang dicetak.	Buku	9.000				
			Jumlah produk hukum yang dipublikasikan.	Buku	40				
			Jumlah sosialisasi JDIH untuk desa.	Sosialisasi	4				
			Bintek JDIH untuk 14 desa percontohan.	Kali	1				
			Jumlah rakor JDIH Tingkat Kabupaten.	Kegiatan	2				
			Jumlah Buku Referensi yang dibeli.	Buku	20				
			Jumlah pameran JDIH yang dilaksanakan.	Kegiatan	1				
			Jumlah publikasi di media masa.	Kali	15				

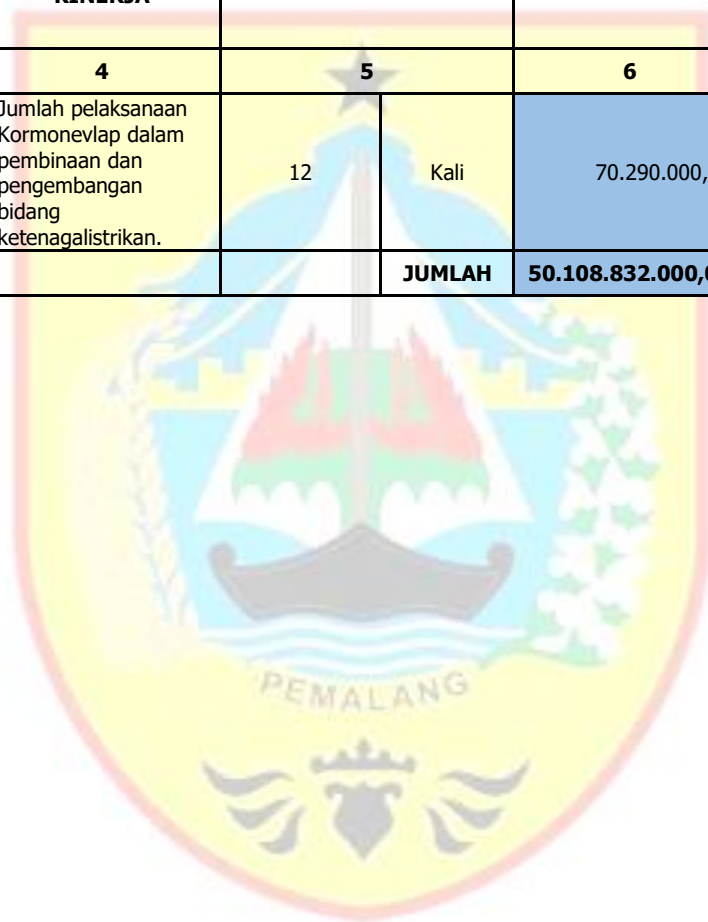
KODE PROG./ KEG.		KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/(BERKURANG)	%
1	2			3	4				
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang dikaji.	PH Daerah	5				
			Jumlah Produk Hukum Desa yang diklarifikasi.	PH Desa	100				
22		Fasilitasi Kerjasama Daerah				347.665.000,00	317.665.000,00	-30.000.000,00	-8,63
	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Regulasi yang mengatur Kerja Sama Daerah / Sinergi yang disusun.	0	Buah	317.665.000,00	287.665.000,00	-30.000.000,00	-9,44
			Jumlah Data Penggalan / Pemetaan Kerja Sama Daerah.	1	Data				
			Jumlah Koordinasi Kerja Sama Wajib yang dilaksanakan.	4	Kabupaten				
			Jumlah Sosialisasi regulasi yang mengatur Kerja Sama Daerah / Sinergi.	0	Kali				
			Jumlah Naskah/ Dokumen Kerja Sama / Sinergi yang disusun.	15	Dokumen				
	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Daerah / Sinergi.	1	Kali	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
23		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				865.586.000,00	878.496.700,00	12.910.700,00	1,49

KODE PROG./ KEG.		KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/(BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah pemantauan pembinaan terhadap pengurusan BUMD dan BLUD.	14 Kali	255.845.000,00	325.845.000,00	70.000.000,00	27,36
			Jumlah raperda penyertaan modal pemerintah daerah.	1 Raperda				
	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah pelaksanaan kormonevlap DBHCHT.	12 Kali	527.794.000,00	500.704.700,00	-27.089.300,00	-5,13
			Jumlah pelaksanaan rakor TPID dan pelaksanaan kormonevlap TPID.	6 Kali				
			Jumlah pelaksanaan rakor ekuinda dan pelaksanaan kormonevlap ekuinda.	6 Kali				
	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah kormonevlap perkoperasian dan UMKM.	6 Kali	81.947.000,00	51.947.000,00	-30.000.000,00	-36,61
	24	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				471.979.750,00	351.706.750,00	-120.273.000,00
1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Analisa Standar Belanja (ASB) yang disusun.	1 Dokumen	205.230.000,00	205.230.000,00	0,00	0,00	
		Jumlah dokumen Satuan Standarisasi Harga (SSH) yang disusun.	3 Dokumen					

KODE PROG./ KEG.		KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/(BERKURANG)	%
1	2	3	4	5		6	7	8	9
	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Rakor pengendalian kegiatan SKPD di Kabupaten Pemalang yang dilaksanakan.	6	Kali	37.388.950,00	36.464.950,00	-924.000,00	-2,47
	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan hasil-hasil pembangunan yang disusun.	1	Laporan	229.360.800,00	110.011.800,00	-119.349.000,00	-52,04
25		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				858.575.000,00	732.366.400,00	-126.208.600,00	-14,70
	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Fasilitas layanan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui tender/ seleksi.	80	Kali	417.575.000,00	317.575.000,00	-100.000.000,00	-23,95
	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah kegiatan desk Rencana Umum Pengadaan (RUP).	2	Kali	298.500.000,00	272.291.400,00	-26.208.600,00	-8,78
			Jumlah sewa colocation back up server LPSE.	1	Kali				
			Jumlah penayangan paket pengadaan barang dan jasa (Tender) lewat LPSE.	80	Paket				
			Jumlah penyediaan layanan ISP untuk LPSE.	12	Bulan				
	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah personil UKPBJ pengadaan barang dan jasa yang mengikuti pelatihan.	15	Orang	142.500.000,00	142.500.000,00	0,00	0,00

KODE PROG./ KEG.		KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/(BERKURANG)	%
1	2			3	4	5	6		
			Jumlah pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa yang dinilai angka kreditnya.	8	Orang				
			Jumlah peserta peningkatan kualitas teknis Sekretariat dan pokja UKPBJ.	25	Orang				
			Jumlah terselenggaranya Pendampingan Hukum PBJ.	12	Bulan				
26		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				215.663.750,00	3.425.202.450,00	3.209.538.700,00	
	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah pelaksanaan kormpnevlap KP3 dan PPTR.	12	Kali	74.175.000,00	3.304.673.650,00	3.230.498.650,00	4355,24
			Jumlah Pelaksanan Investigasi/identifikasi	200	Kali				
			Pengumpulan data informasi peredaran cukai ilegal	200	Kali				
			Jumlah penerima manfaat BLT bagi Buruh / Petani Tembakau	600	Orang				
	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah pelaksanaan Kormonevlap perlindungan pengelolaan dan konservasi sumber daya alam.	8	Kali	71.198.750,00	50.238.800,00	-20.959.950,00	-29,44

KODE PROG./ KEG.		KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/(BERKURANG)	%
1	2	3	4	5		6	7	8	9
	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah pelaksanaan Kormonevlap dalam pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan.	12	Kali	70.290.000,00	70.290.000,00	0,00	0,00
					JUMLAH	50.108.832.000,00	53.235.281.400,00	3.093.093.000,00	6,17




BAB VI PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Setda Kabupaten Pemalang Tahun 2021 disusun sebagaimana rangkaian proses perencanaan daerah sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Hal tersebut dimaksudkan bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, diperlukan perubahan perencanaan pembangunan sebagai hasil pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja pembangunan daerah. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat mendesak dan penting untuk segera diimplementasikan, maka perubahan Rencana Kerja Setda Kabupaten Pemalang merupakan sesuatu hal yang bersifat mutlak untuk dilakukan.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 disusun sebagai bahan masukan didalam perumusan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2021.



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG


Dr. AP. Ir. MOHAMAD ARIFIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660103 199203 1 009